

ANALISIS KASUS KEPUTUSAN PRESIDEN DONALD TRUMP KELUAR DARI JCPOA

Matius Chavin Fredrik Garjito

071411231054

ABSTRACT

Donald Trump as President of the United States (US) has pulled the US out of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Trump's decision to pull the US out of JCPOA was carried out when each party - especially Iran - is obeying all the provisions in JCPOA. In this paper, the author answers the question of why Trump took the decision for the US to leave JCPOA and how Trump influenced elites who supported the JCPOA. The author's efforts to answer these questions is done by analyzing Trump as an individual decision maker in the process of formulating the US exit policy from JCPOA using the belief theory. Theorization used by the author in this study contains the definition of belief and the meanings of belief in individual actions and the impact of leaders' beliefs in the process of foreign policy decision making. In addition, the author also pays attention to the process of formulating foreign policy as a process in which information and idea from leader and elites whose job is to assist leader are discussed. The author discovered that Trump decided that the US should leave JCPOA because of his belief that the JCPOA was a bad deal that is adverse to the US. In the process of formulating foreign policy regarding JCPOA, Trump actually had different beliefs from the elites that he himself chose to assist him in formulating, implementing, and reviewing foreign policy. Trump then sought extreme ways by dismissing those who supported JCPOA and replaced them with individuals who had the same vision as the president to end the JCPOA.

Keywords: *Donald Trump, Belief, Joint Comprehensive Plan of Action, Iran*

Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Keputusan Trump mengeluarkan AS dari JCPOA dilakukan ketika masing-masing pihak - utamanya Iran - patuh terhadap ketentuan-ketentuan dalam JCPOA. Melalui tulisan ini, penulis menjawab pertanyaan mengapa Trump mengambil keputusan keluar dari JCPOA dan bagaimana Trump mempengaruhi elite yang mendukung JCPOA. Upaya penulis menjawab pertanyaan tersebut dilakukan dengan cara menganalisis Trump sebagai *individual decision maker* dalam proses perumusan kebijakan keluarnya AS dari JCPOA dengan menggunakan teori mengenai keyakinan pribadi atau *belief*. Teorisasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi apa yang dimaksud dengan *belief* serta arti pentingnya dalam tindakan seorang individu dan dampak *belief* seorang pemimpin terhadap proses perumusan kebijakan luar negeri. Selain itu, penulis turut memperhatikan proses perumusan kebijakan luar negeri sebagai sebuah proses di mana terjadi pertukaran informasi dan gagasan baik dari pemimpin dan juga elite yang membantu pemimpin. Penulis lantas menemukan bahwa Trump memutuskan agar AS keluar dari JCPOA karena *belief*-nya bahwa JCPOA merupakan sebuah kesepakatan buruk yang merugikan AS. Dalam proses perumusan kebijakan luar negeri mengenai JCPOA, Trump nyatanya memiliki *belief*

merumuskan, melaksanakan, dan meninjau ulang kebijakan luar negeri. Trump lantas menempuh cara yang ekstreme dengan memecat mereka yang mendukung JCPOA dan menggantikannya dengan individu-individu yang memiliki kesamaan visi dengannya untuk mengakhiri JCPOA.

Kata-kata kunci: Donald Trump, *Belief*, *Joint Comprehensive Plan of Action*, Iran

AS telah mengundurkan diri dari JCPOA. Kebijakan AS tersebut pada awalnya telah disampaikan oleh Trump dalam sebuah konferensi pers yang dilaksanakan di Gedung Putih pada tanggal 8 Mei 2018. Sebagai tindak lanjut atas pengumuman itu, Trump lantas mengeluarkan sebuah *Executive Order* pada tanggal 6 Agustus 2018 yang secara resmi menandakan keluarnya AS dari JCPOA dengan kembali memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Iran yang sebelumnya telah dicabut sebagai salah satu ketentuan dalam JCPOA. Dalam pernyataannya yang disampaikan pada hari itu, Trump (2018) secara eksplisit mengatakan bahwa hari ini, AS mengambil tindakan untuk menerapkan kembali sanksi yang berkaitan dengan nuklir Iran yang sebelumnya telah dicabut melalui Joint Comprehensive Plan of Action 14 Juli 2015.

Kebijakan Trump mengeluarkan AS dari JCPOA lantas menarik untuk diteliti lebih lanjut mengingat sejauh ini Iran patuh terhadap ketentuan-ketentuan dalam JCPOA. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Beauchamp (2018), bukti terbaik yang ada mengisyaratkan bahwa Iran benar-benar mematuhi kesepakatan dengan menghentikan sebagian besar program nuklirnya dan memberikan ruang gerak bagi inspektur internasional untuk memastikan Iran tidak berbuat curang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penulis lantas mengajukan dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah mengapa Trump mengambil keputusan keluar dari JCPOA? Sementara itu, pertanyaan penelitian yang kedua adalah bagaimana Trump mempengaruhi elite yang mendukung JCPOA? Penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Adapun pertanyaan penelitian yang kedua berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan penelitian yang pertama. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori mengenai keyakinan pribadi atau *belief*, utamanya mengenai arti penting *belief* dalam tindakan seorang individu dan dampak *belief* seorang pemimpin dalam proses perumusan kebijakan luar negeri.

Mengeni JCPOA sebagai sebuah Kesepakatan

Sementara itu, terkait dengan kesepakatan nuklir Iran, JCPOA berhasil disepakati pada tanggal 14 Juli 2015. JCPOA sebagai sebuah kesepakatan yang berkaitan dengan upaya menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir disepakati oleh tujuh negara yang terdiri atas 5+1 negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) – yaitu AS, Britania Raya, Perancis, Rusia, Tiongkok, dan Jerman, – serta Iran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kerr dan Katzman (2018), JCPOA dirancang sebagai sebuah upaya untuk memastikan agar program nuklir yang dikembangkan oleh Iran dapat digunakan murni demi tujuan damai dan sebagai gantinya, sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh AS, Uni Eropa (UE), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran dicabut seluruhnya.

perlu diketahui sebagai bentuk keberlanjutan disepakatinya JCPOA. Pasca disepakati pada tanggal 14 Juli 2015, parlemen Iran menyetujui JCPOA dan menyatakan bahwa JCPOA akan efektif berlaku pada tanggal 18 Oktober 2015. Hari berlakunya JCPOA tersebut kemudian dikenal sebagai *Adoption Day*. Selanjutnya, tanggal 16 Januari 2016 diperingati sebagai *Implementation Day* setelah Badan Tenaga Atom Internasional atau yang lebih sering disebut sebagai IAEA memastikan bahwa Iran telah patuh terhadap serangkaian peraturan awal mengenai pemanfaatan nuklir.

Terkait dengan isinya, JCPOA mencakup beberapa hal penting yang bersifat teknis yang dapat digunakan untuk mengendalikan – jika tidak menghentikan – program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Mengenai hal ini, Harris, Posner, dan Fisher (2015) menyatakan bahwa hal penting yang bersifat teknis yang terdapat dalam JCPOA adalah (1) persediaan, (2) pengayaan atau *enrichment*, (3) mesin putar atau *centrifuges*, (4) inspeksi, dan (5) sanksi. Terkait dengan persediaan, Iran diharuskan mengurangi jumlah persediaan material nuklir yang dimilikinya sebanyak 97%. Sebelum adanya JCPOA, Iran memiliki persediaan material nuklir sebanyak 10.000kg. Namun, dengan adanya JCPOA, persediaan material nuklir yang dimiliki oleh Iran hanya sebanyak 300kg. Kemudian, terkait dengan pengayaan, Iran hanya diperbolehkan memperkaya uranium yang dimilikinya hingga 3,67%. Tingkat pengayaan uranium yang demikian berada jauh di bawah tingkat pengayaan uranium yang diperlukan untuk penelitian ilmiah yang berada pada tingkat 20%, sementara tingkat pengayaan uranium yang diperlukan untuk membangun senjata nuklir berada pada tingkat 90%. Selanjutnya, terkait dengan mesin putar, Iran diharuskan menyerahkan mesin putar material nuklir yang dimilikinya dari sejumlah 20.000 hingga hanya sejumlah 5.000. Berikutnya, terkait dengan inspeksi, inspeksi yang dilakukan merupakan suatu bentuk pengawasan agar Iran tidak berbuat curang dan mengkhianati JCPOA. Adapun inspeksi tersebut dilakukan oleh perwakilan dari IAEA dan PBB. Terakhir, terkait dengan sanksi, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, segala sanksi yang diberlakukan terhadap Iran dicabut.

JCPOA sesungguhnya memiliki banyak manfaat tidak hanya bagi mereka yang khawatir akan program senjata nuklir yang dikembangkan oleh Iran, tetapi juga bagi Iran itu sendiri. Adapun salah satu manfaat yang dimaksud adalah bagi AS. Terkait dengan hal tersebut, Kerr dan Katzman (2018) menyatakan bahwa manfaat terbesar JCPOA bagi AS adalah dengan adanya JCPOA, AS tidak perlu khawatir akan program senjata nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Hal itu dikarenakan AS dan negara-negara lain yang terlibat dalam negosiasi JCPOA menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan cara yang paling efektif untuk memastikan agar Iran tidak dapat mengembangkan senjata nuklir. Di sisi lain, bagi Iran sendiri, JCPOA mengakhiri sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh AS, UE, dan PBB. Sanksi-sanksi tersebut sebelumnya diberlakukan dengan cara memotong perekonomian Iran dari dunia luar. Adapun sebagaimana yang dikemukakan oleh Harris, Posner, dan Fisher (2015), sanksi-sanksi tersebut utamanya diberlakukan dalam hal keuangan internasional dan perbankan internasional yang menghancurkan perekonomian Iran. Meskipun JCPOA sebagai sebuah kesepakatan telah berhasil menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi AS, nyatanya Trump pada akhirnya tetap memutuskan untuk mengeluarkan AS dari JCPOA.

Arti Penting *Belief* dalam Tindakan seorang Individu

Terkait dengan teori yang pertama, Hermann (1980) menyatakan bahwa *belief* atau keyakinan dapat diartikan sebagai asumsi dasar seorang pemimpin tentang keadaan dunia. *Belief* seorang pemimpin pada umumnya terbentuk berkat pengetahuan serta pengalaman pribadi yang dimiliki dan telah ada dalam dirinya jauh sebelum dirinya memperoleh jabatan yang berperan dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Berbeda dengan Hermann, Renshon (2008) mendefinisikan *belief* secara lebih sederhana, yaitu dengan mengartikannya sebagai sesuatu yang dipercayai sebagai sebuah kebenaran. *Belief* menurutnya dapat berupa hubungan sebab akibat atau asumsi dasar mengenai cara dunia beroperasi. Sementara itu, tak jauh berbeda dengan Renshon, Mercer (2010) turut mendefinisikan *belief* sebagai sebuah dalil atau sekumpulan dalil yang dipercayai oleh seorang individu sebagai sebuah kebenaran. Menurutnya, *belief* mengisyaratkan ketidakpastian. Hal ini berbeda dengan pengetahuan yang cenderung bebas risiko, impersonal, dan konstan.

Belief tentunya memiliki arti penting dalam tindakan seorang individu. Terkait dengan hal tersebut, *belief* dapat menjadi alasan bagi seorang individu untuk bertindak serta menjadi latar belakang bagi seorang individu untuk menentukan tindakan. Dalam kaitan antara *belief* seorang pemimpin dan proses perumusan kebijakan luar negeri, Iayedjiev (2011) menyatakan bahwa terdapat tiga alasan *belief* memiliki arti penting, yaitu (1) teori mengenai pilihan rasional saja tidak dapat menjelaskan perilaku manusia yang sebenarnya, (2) terdapat bias psikologis dan keterbatasan manusia yang turut berperan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, dan (3) adanya ahli kebijakan luar negeri yang beroperasi di lingkungan tertentu yang meningkatkan peran karakteristik serta *belief* seorang individu. Mengenai alasan arti penting *belief* yang pertama, sebagaimana yang diketahui, dalam teori pilihan rasional, terdapat asumsi mengenai entitas diskret yang mampu bertindak dengan sengaja. Dalam tulisan Lovett (2006), dinyatakan bahwa manusia merupakan entitas diskret yang mampu mempertimbangkan beberapa kemungkinan tindakan yang berbeda dan dengan sengaja memilih serta melaksanakan – atau mencoba melaksanakan – satu atau lebih tindakan tersebut. Adapun konsekuensi logis dari teori pilihan rasional adalah seharusnya dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, seorang pemimpin menggunakan cara sistematis yang meliputi penilaian terhadap segala pilihan yang ada beserta konsekuensinya. Namun demikian, pada nyatanya hal tersebut tidak serta merta dilakukan karena berbagai hal.

Kemudian, mengenai alasan arti penting *belief* yang kedua, para pemimpin memiliki bias tersendiri terhadap keadaan yang sedang dihadapi. Bias tersebut dapat diakibatkan karena terbatasnya kapasitas otak manusia serta emosi pribadi seorang individu. Bias yang demikian dapat berupa simplifikasi yang berlebihan terhadap keadaan yang sedang dihadapi dengan begitu banyak – atau sedikitnya – informasi yang diperoleh sehingga dapat berujung pada penilaian yang keliru serta kurang tepatnya kebijakan luar negeri yang dirumuskan. Dalam kondisi tersebut, *belief* seorang pemimpin cenderung memainkan peranan yang lebih penting dan lebih mungkin mempengaruhi pilihan yang diambil. Terakhir, mengenai alasan arti penting *belief* yang ketiga, keadaan spesifik di mana para ahli kebijakan luar negeri bekerja membuat *belief* digunakan sebagai instrumen untuk menyaring informasi yang diterima dan mempengaruhi respon mereka terhadap informasi yang telah

terbatasnya ketersediaan akses terhadap informasi, tekanan pekerjaan yang tinggi, dan kompleksitas keadaan yang dihadapi.

***Belief* seorang Pemimpin dalam Proses Perumusan Kebijakan Luar Negeri**

Kemudian, mengenai teori yang kedua tentang dampak *belief* seorang pemimpin dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, George (1969) menyatakan bahwa *belief* seorang pemimpin politik tentang sifat dasar politik dan konflik politik, pandangannya berkaitan dengan sejauh mana perkembangan sejarah dapat dibentuk, serta gagasannya tentang strategi dan strategi yang benar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan seorang aktor. Sama halnya dengan George, Hermann (1980) turut mengemukakan bahwa *belief* berdampak pada interpretasi seorang pemimpin politik terhadap lingkungannya dan dengan demikian juga terhadap strategi yang digunakan oleh pemimpin tersebut. Dengan cara penyampaian yang berbeda dari George dan Hermann, Rhenson (2008) menjelaskan bahwa dalam konteks perumusan kebijakan politik, pemimpin tidak bereaksi terhadap realitas obyektif, tetapi pada realitas subjektif yang telah disaring melalui *belief*. Dengan kata lain, *belief* kembali dinyatakan berperan sebagai filter bagi seorang pemimpin dalam proses perumusan kebijakan.

Sementara itu, dalam merumuskan sebuah kebijakan luar negeri, seorang pemimpin tak jarang berbeda pendapat atau bahkan berselisih dengan elite lain yang juga berperan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Perbedaan pendapat dan perselisihan tersebut dapat terjadi ketika adanya perbedaan pandangan atau *belief* yang dimiliki oleh pemimpin dan elite lainnya. Dalam keadaan yang demikian, proses perumusan kebijakan luar negeri dapat dilihat sebuah proses di mana terjadi pertukaran informasi dan gagasan baik dari pemimpin maupun individu lainnya. Terkait dengan hal ini, Hermann dan Hagan (1998) dalam tulisannya mengungkapkan beberapa cara yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin terhadap elite lainnya yang berperan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri agar *belief* pemimpin tersebut dapat menjadi sebuah kebijakan luar negeri. Adapun cara yang pertama adalah pemimpin harus membangun konsensus tentang bagaimana suatu permasalahan dapat diinterpretasikan. Kedua, pemimpin dapat menentukan pilihan-pilihan yang memungkinkan. Ketiga, pemimpin dapat memperoleh informasi lebih lanjut dan dari siapakah informasi lebih lanjut tersebut diperoleh. Keempat, pemimpin dapat memilih siapakah individu yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Terakhir, pemimpin dapat menentukan waktu implementasi kebijakan luar negeri yang telah dirumuskan. Kelima cara tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin agar aksi dapat berjalan dan kebijakan luar negeri dapat dijalankan.

Trump dan Keyakinan Pribadinya

Penjelasan tentang *belief* Trump dalam kapasitasnya sebagai seorang perumus kebijakan luar negeri itu sendiri menjadi penting oleh karena sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu bahwa *belief* seorang perumus kebijakan luar negeri mempengaruhi tindakan serta kebijakan luar negeri yang dirumuskannya. Dalam upaya menjelaskan *belief* pribadi Trump, penulis menggunakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh Trump sendiri maupun tulisan-tulisan tentang Trump yang

Trump percaya bahwa seseorang harus menjadi juara bila ia ingin mendapat tempat dalam masyarakat.

Sebelum membahas lebih jauh tentang *belief* yang demikian, penulis terlebih dahulu menyampaikan siapa yang pantas disebut sebagai seorang juara menurut Trump. Trump sendiri memberikan dua definisi seorang juara dalam buku yang ditulis oleh dirinya sendiri dengan judul *Think Like a Champion*. Dalam bukunya tersebut, Trump dan McIver (2009) menyebut seorang juara adalah mereka yang menunjukkan superioritas. Dengan kata lain, Trump melihat bahwa seorang juara memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain dan dengan demikian mereka mampu menjadi yang terbaik. Kemudian, definisi seorang juara yang kedua yang dituliskan oleh Trump adalah mereka yang merupakan pemenang hadiah pertama atau posisi pertama dalam kompetisi. Kedua definisi seorang juara menurut Trump yang demikian sesungguhnya memiliki korelasi dengan *belief* pribadinya sendiri. Trump menilai bahwa seorang juara – yang berhasil “mengalahkan” pihak lawan – pada akhirnya akan dianggap sebagai seorang yang hebat atau *great*. Dengan membuat lawan tertunduk, seorang juara menurut Trump pastinya akan dijunjung dan dipuji oleh masyarakat.

Sementara itu, kedua definisi seorang juara tersebut turut mengungkapkan *worldview* yang dimiliki oleh Trump, yaitu kompetisi. Trump memandang dunia pada dasarnya bersifat kompetitif atau dengan kata lain penuh persaingan. Secara lebih spesifik, kompetisi yang ada bersifat *zero-sum game* yang mana berarti kemenangan seorang juara sebanding dengan kekalahan pihak lawan.

Belief pribadi Trump bahwa seseorang harus menjadi juara bila ingin mendapat tempat dalam masyarakat berdampak dalam pandangan politiknya. Adapun pandangan politik Trump yang penulis maksud adalah bahwa AS tidak lagi menjadi juara sehingga dengan demikian tidak mendapat tempat dalam masyarakat internasional. Pandangan politik Trump tersebut mulai dapat terlihat ketika Trump banyak memberikan kritikan dan komentar terhadap kebijakan yang diambil oleh Obama pada masa pemerintahannya yang kedua, terutama ketika AS telah menyepakati JCPOA. Hal itu dapat dibuktikan dengan sebuah buku berjudul *Crippled America: How to Make America Great Again* yang ditulis oleh Trump sendiri. Di awal tulisannya, Trump (2015) mengatakan bahwa AS harus mulai menang kembali. Melalui pernyataan tersebut, Trump secara implisit mengemukakan bahwa AS sudah tidak menang atau dengan kata lain selalu mengalami kekalahan. Adapun kekalahan AS dicontohkan oleh Trump melalui kasus negosiasi JCPOA. Trump menyebut JCPOA sebagai sebuah salah satu perjanjian paling penting bagi AS dan pemerintahan di Washington tak mampu mendiskusikan apalagi menegosiasikannya.

Tidak hanya melalui buku, Trump turut mengemukakan pandangan politiknya bahwa AS mengalami kekalahan pada saat dirinya berpidato untuk mengumumkan bahwa dirinya mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum tahun 2016. Dikutip dari Time Staff (2015), Trump secara eksplisit menyebutkan bahwa AS dahulu memiliki kemenangan, namun sekarang tidak. Sebagai kelanjutan dari dampak *belief* pribadi Trump dalam pandangan politiknya tersebut, Trump lantas mulai menggaungkan slogan *Make America Great Again* dan berjanji untuk mengembalikan martabat AS dalam komunitas internasional setelah sebelumnya ia

Terkait dengan hal ini, Wolf (2017) mengatakan bahwa Trump berpandangan *Make America Great Again* seharusnya selalu menjadi tujuan utama para perumus kebijakan luar negeri AS. Secara spesifik, hal itu dilakukan agar AS menjadi “yang pertama” atau “juara” yang tak terbantahkan dan dengan demikian dihormati oleh masyarakat internasional.

JCPOA sebagai sebuah Kesepakatan yang Buruk bagi Trump

JCPOA adalah sebuah kesepakatan yang buruk bagi Trump pertama-tama karena Trump memiliki *belief* bahwa Iran menerima uang sejumlah 150 milyar dollar AS dari pemerintah AS sebagai bagian dari ketentuan dalam JCPOA serta uang tersebut digunakan oleh pemerintah Iran untuk membeli 144 pesawat jet komersial. Berdasarkan *belief* yang demikian, kesan yang ada adalah seolah-olah pemerintah AS membayar pemerintah Iran sebesar 150 milyar dollar AS secara tunai maupun non-tunai dan pemerintah AS tidak memperoleh apapun atas “transaksi” tersebut. *Belief* Trump tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini dikarenakan tidak ada pemberian sejumlah uang baik secara tunai maupun non-tunai oleh pemerintah AS kepada pemerintah Iran sebagai bagian dari ketentuan dalam JCPOA. Dalam JCPOA itu sendiri, penulis sama sekali tidak menemukan ketentuan yang menyatakan bahwa pemerintah Iran menerima uang sebesar 150 milyar dollar AS apalagi kalimat yang menyatakan bahwa pemerintah AS menjadi pihak yang melakukan pembayaran tersebut. Terkait dengan angka 150 milyar dollar AS, Greenberg (2018) menyatakan bahwa angka itu merupakan estimasi konservatif para ahli dari pencairan aset milik pemerintah Iran yang sebelumnya telah dibekukan melalui sanksi yang diberlakukan oleh AS, Uni Eropa, dan PBB terhadap Iran. Estimasi konservatif menandakan bahwa estimasi demikian merupakan estimasi dengan asumsi jumlah nilai tertinggi. Pada kenyataannya, jumlah nilai aset yang dicairkan lebih rendah daripada itu. Penting pula untuk penulis tekankan bahwa aset yang dicairkan sebagai akibat dari dicabutnya sanksi melalui ketentuan dalam JCPOA adalah aset milik pemerintah Iran sendiri.

Kemudian, terkait dengan kesan bahwa pemerintah AS tidak memperoleh apapun atas “transaksi” dengan pemerintah Iran, penulis menilai Trump mengabaikan fakta penting bahwa dengan adanya JCPOA, pemerintah AS memperoleh sebuah keuntungan besar, yaitu pemerintah Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Melalui JCPOA, U.S. Department of State (2015) secara eksplisit dinyatakan bahwa Iran tidak akan melakukan kegiatan yang dapat berkontribusi pada perangkat ledak nuklir bahkan meskipun hanya pada tingkat penelitian dan pengembangan. Hal ini menunjukkan komitmen Iran untuk tidak membangun senjata nuklir demi dicabutnya sanksi-sanksi yang telah melumpuhkan perekonomian Iran. Lebih lanjut, Qiu (2016) menegaskan bahwa para ahli dapat mendeteksi ambisi pemerintah Iran untuk mengembangkan senjata nuklir sebelum benar-benar melaksanakannya. Iran yang tidak akan mengembangkan apalagi membangun senjata nuklir merupakan sebuah keuntungan besar bagi AS.

Selanjutnya, terkait dengan *belief* Trump bahwa pemerintah AS membeli 144 pesawat jet komersial dengan menggunakan uang “pemberian” pemerintah AS juga tidak berdasarkan pada fakta yang ada. Tentang hal ini, Hopher (2017) menyebut rencana maskapai nasional Iran – yaitu IranAir – untuk membeli 180 pesawat jet komersial dari Airbus dan Boeing sebagai sebuah kesepakatan ekonomi yang paling

negara kekuatan utama dunia terhadap Iran dicabut melalui ketentuan-ketentuan dalam JCPOA. Penulis menyebut *belief* Trump tidak berdasarkan pada fakta karena pemerintah Iran tidak membeli pesawat. Maskapai nasional Iran lah yang membeli pesawat. Lebih lanjut, maskapai nasional Iran membeli pesawat dengan menggunakan dana pinjaman yang diperoleh dari bank asing.

Kedua, JCPOA adalah sebuah kesepakatan yang buruk bagi Trump karena Trump memiliki *belief* bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat dalam JCPOA tidak cukup kuat untuk menghentikan Iran mengembangkan nuklir. *Belief* Trump yang demikian sesungguhnya tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Hal itu dikarenakan melalui JCPOA, Iran memang diperbolehkan mengembangkan nuklir dan haknya atas teknologi nuklir diakui. Meskipun demikian, yang perlu digarisbawahi adalah Iran hanya diperbolehkan mengembangkan nuklir demi tujuan damai dan akan sangat sulit bagi Iran untuk mengembangkan nuklir dengan tujuan untuk membuat senjata nuklir. Hal ini dikarenakan melalui ketentuan yang termuat dalam JCPOA, terdapat serangkaian langkah yang dapat menjamin agar Iran tidak dapat mengembangkan senjata nuklir. Adapun melalui ketentuan-ketentuan dalam JCPOA, perihal penyuburan, persediaan material nuklir, situs reaktor air berat di Arak, dan transparansi diatur sedemikian rupa secara mendetil. Terkait dengan penyuburan, melalui JCPOA, U.S. Department of State (2015) membatasi penyuburan dan segala aktivitas yang berhubungan dengan penyuburan uranium untuk jangka waktu 8 tahun pertama. Pembatasan yang dimaksudkan adalah penyuburan uranium hanya boleh dilakukan hingga batas 3,67%. Pembatasan penyuburan uranium yang demikian sebenarnya sangat mengekang. Hal itu dikarenakan agar dapat digunakan untuk membangun senjata nuklir, uranium harus disuburkan hingga 90%. Kemudian, mengenai persediaan material nuklir, melalui JCPOA, U.S. Department of State (2015) mengatur agar Iran hanya diperkenankan memiliki persediaan uranium sebanyak 300kg untuk jangka waktu 15 tahun pertama. Peraturan yang demikian menandakan bahwa Iran harus menyerahkan 9.700kg persediaan uranium lainnya untuk selanjutnya dijual dengan harga pasar dan dibeli oleh pihak asing.

Berikutnya, mengenai situs reaktor air berat di Arak, melalui JCPOA, U.S. Department of State (2015) menyatakan bahwa situs reaktor air berat yang dimaksud akan dirancang dan dibangun ulang agar dapat memproduksi serta memproses material nuklir untuk tujuan medis dan industri. Adapun perancangan dan pembangunan ulang situs reaktor nuklir berat di Arak dilakukan oleh pemerintah Iran sendiri untuk selanjutnya diperiksa oleh perwakilan dari pemerintahan negara-negara P5+1. Terakhir, mengenai transparansi, melalui JCPOA, U.S. Department of State (2015) menyatakan Iran bersedia untuk mengizinkan IAEA melakukan pemantauan terhadap langkah yang telah diambil oleh pemerintah Iran untuk menghentikan program senjata nuklir. IAEA itu sendiri akan berada di Iran dalam jangka waktu yang lama dan melakukan pengawasan terhadap material nuklir yang dihasilkan dan diproses oleh Iran selama 25 tahun ke depan serta terhadap mesin penyuburan selama 20 tahun ke depan.

Ketiga, JCPOA adalah sebuah kesepakatan yang buruk bagi Trump karena Trump memiliki *belief* bahwa Iran telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam JCPOA dengan melakukan uji coba rudal balistik. Berdasarkan *belief* yang demikian, kesan yang ada adalah seolah-olah negara-negara P5+1 dan IAEA mengabaikan “fakta”

tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta yang ada, yaitu bahwa ketentuan-ketentuan dalam JCPOA tidak mengatur tentang aktivitas uji coba rudal balistik. Bahkan, dalam JCPOA yang dipublikasikan oleh U.S. Department of State (2015) itu sendiri penulis tidak dapat menemukan satu kata pun yang menyebutkan rudal atau balistik apalagi aktivitas yang merujuk pada uji coba rudal balistik. Hal ini dikarenakan memang JCPOA bukanlah sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk menghentikan uji coba rudal balistik oleh Iran. JCPOA adalah sebuah kesepakatan yang dibuat dengan tujuan untuk menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir. Pengembangan senjata nuklir dan uji coba rudal balistik memang dalam satu dua hal saling berhubungan. Hal tersebut dikarenakan rudal balistik – utamanya yang memiliki daya jelajah antarbenua – dapat digunakan sebagai senjata nuklir bila hulu ledak yang dipasangkan pada rudal balistik tersebut adalah hulu ledak nuklir. Namun demikian, dalam kasus ini, uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Iran dan perkembangan senjata nuklir adalah dua kasus yang berbeda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Missile Threat (2018), kasus rudal balistik Iran berhubungan dengan peran Iran sebagai “pusat proliferasi rudal”.

Keempat, JCPOA adalah sebuah kesepakatan yang buruk bagi Trump karena Trump memiliki *belief* bahwa Iran akan menggunakan senjata nuklir yang “dibangunnya” untuk menyerang negara-negara tertentu, utamanya AS, Saudi Arabia, dan Israel. Berdasarkan *belief* yang demikian, kesan yang ada adalah Iran tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuan dalam JCPOA dengan membangun senjata nuklir. *Belief* Trump tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini dikarenakan Iran selalu mematuhi ketentuan-ketentuan dalam JCPOA sejak JCPOA itu sendiri disepakati. Dalam laporan IAEA yang dibuat oleh Board of Governors (2016), dinyatakan bahwa Iran telah mematuhi segala ketentuan dalam kesepakatan JCPOA, mulai dari tidak melakukan penyuburan, menyingkirkan persediaan material nuklir yang berlebihan, melakukan perancangan ulang situs reaktor air berat di Arak, hingga memberikan akses terhadap IAEA untuk memeriksa dan memverifikasi langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Kepatuhan Iran terhadap ketentuan-ketentuan dalam JCPOA terus berlanjut hingga pada saat tulisan ini dibuat. Oleh karenanya menjadi tidak logis apabila Iran menyerang AS, Arab Saudi, dan Israel dengan menggunakan senjata nuklir karena Iran memang tidak memiliki senjata nuklir dari awalnya.

Cara Trump Mempengaruhi Elite yang Mendukung JCPOA

Yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah cara yang ditempuh oleh Trump dalam upayanya untuk mempengaruhi mereka yang mendukung JCPOA. Dalam bahasa yang halus, Trump menggunakan cara yang ekstreme untuk mempengaruhi ketiga elite yang mendukung JCPOA. Terkait dengan Menlu Tillerson yang sepenuhnya mendukung agar AS tetap berada dalam JCPOA, Trump memberhentikan Tillerson dari jabatannya selaku Menlu. Hal itu dilakukan oleh Trump dengan cara menyampaikan keputusannya melalui sebuah cuitan di Twitter pada tanggal 13 Maret 2018. Dalam cuitannya, Trump (2018) mengatakan bahwa Mike Pompeo yang merupakan Direktur Central Intelligence Agency (CIA) akan menjadi Menlu yang baru menggantikan Tillerson. Lebih lanjut, Trump mengucapkan terima kasih kepada Tillerson atas pelayanannya sebagai Menlu. Cuitan Trump yang demikian mengejutkan banyak pihak bukan hanya karena

karena Trump telah menunjuk Pompeo untuk dinominasikan sebagai Menlu yang baru. Adapun alasan Trump memecat Tillerson tidak dijelaskan dalam cuitan tersebut. Barulah pada sebuah sesi tanya jawab dengan wartawan pada hari yang sama Trump menjelaskan keputusannya untuk memecat Tillerson. Dikutip dari CNN (2018), Trump secara eksplisit mengatakan bahwa terdapat pertentangan antara dirinya dengan Menlu Tillerson dalam beberapa isu dan perbedaan dalam hal cara berpikir. Lebih lanjut, Trump turut memberikan contoh utamanya mengenai JCPOA. Trump mengatakan bahwa ketika dirinya menilai JCPOA sebagai sebuah kesepakatan yang buruk dan ingin “berbuat sesuatu” terhadapnya, Tillerson memikirkan hal yang berbeda.

Sementara itu, berhubungan dengan posisi Pompeo dalam perumusan kebijakan mengenai JCPOA, layaknya Trump, Pompeo sendiri kontra terhadap JCPOA. Posisi Pompeo yang demikian dapat terlihat secara jelas jauh pada saat dirinya belum ditunjuk oleh Trump untuk menjabat sebagai Direktur CIA. Dikutip dari Ward (2018), Pompeo memiliki kesamaan dengan Trump dalam hal keinginan untuk mengakhiri JCPOA. Pada November 2016, Pompeo menyampaikan pernyataan melalui sebuah cuitan di Twitter yang mengatakan bahwa dirinya berharap dapat “menggulung” kesepakatan yang membawa bencana dengan negara sponsor terorisme terbesar di dunia. Sementara itu, pada saat ia menjabat sebagai Direktur CIA, Pompeo menuduh Iran telah berbuat curang. Meskipun demikian, klaim kecurangan Iran tersebut tidak disertai dengan bukti yang konkret oleh Pompeo. Dikutip dari Smith (2017), Pompeo mengklaim bahwa dirinya mengetahui jika Iran telah “berbuat curang” meskipun dirinya belum melihatnya secara langsung. Klaim Pompeo tersebut sesungguhnya mengerikan terlebih hal itu disampaikan oleh dari seseorang yang menjabat sebagai Direktur CIA. Posisi Pompeo yang kontra terhadap JCPOA turut berlanjut ketika dirinya telah dinominasikan oleh Trump untuk menjabat sebagai Menlu. Dalam sidang konfirmasi sebagai Menlu di hadapan komite Senat AS, Pompeo tidak secara eksplisit menyampaikan pandangannya terhadap JCPOA. Dikutip dari Hains (2018), ketika Pompeo ditanyai pandangannya tentang apakah AS harus keluar secara sepihak dari JCPOA apabila JCPOA tidak diperbaiki sesuai kemauan Trump, Pompeo tidak memberikan jawaban “ya” atau “tidak” secara definitif. Melainkan, Pompeo menyatakan bahwa tujuan utama dirinya bila dikonfirmasi oleh Senat AS untuk menjabat sebagai Menlu adalah untuk “memperbaiki” JCPOA dan hal itu merupakan “kepentingan terbaik” bagi AS. Sebagai pembelaannya, Pompeo mengatakan bahwa pertanyaan yang diajukan merupakan sebuah pertanyaan hipotetis karena hal itu belum terjadi dan dengan demikian ia tidak dapat menjawabnya secara pasti.

Kemudian, terkait dengan Penasehat Keamanan Nasional McMaster yang juga mendukung JCPOA, Trump turut memberhentikan McMaster dari jabatannya selaku Penasehat Keamanan Nasional layaknya Trump memberhentikan Tillerson dari jabatannya sebagai Menlu. Keputusan Trump untuk memecat McMaster disampaikan oleh Trump sendiri melalui sebuah cuitan di Twitter pada tanggal 22 Maret 2018. Dalam cuitannya, Trump (2018) mengatakan bahwa efektif per tanggal 9 April 2018 John Bolton yang merupakan mantan Duta Besar AS untuk PBB akan menjadi Penasehat Keamanan Nasional yang baru menggantikan McMaster. Lebih lanjut, Trump mengucapkan terima kasih kepada McMaster atas pelayanannya sebagai Penasehat Keamanan Nasional dan menyatakan bahwa McMaster akan selalu menjadi “kawan” bagi Trump. Adapun alasan Trump memecat McMaster

diungkapkan oleh Parker et al. (2018), Trump tidak pernah dekat secara personal dengan McMaster. Berkaitan dengan hal ini, dalam BBC (2018) dinyatakan bahwa Trump bahkan pernah memotong McMaster ketika sedang berbicara dan mempermalukan McMaster dengan menyebut McMaster terlalu serius pada saat memberikan pemaparan. Keputusan Trump untuk memecat McMaster dari jabatannya selaku Penasehat Keamanan Nasional pada satu sisi sesungguhnya bukan merupakan suatu hal yang mengejutkan. Hal ini dikarenakan sebelumnya telah beredar kabar bahwa Trump telah memiliki niatan untuk memecat McMaster. Mengenai hal ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ward (2018), Trump tidak serta merta memecat McMaster ketika ia telah memutuskan untuk memecatnya dikarenakan Trump ingin memastikan adanya pengganti yang “menonjol” dan McMaster memiliki kejelasan dalam hal pekerjaan berikutnya. Dengan kata lain, Trump berusaha agar pergantian Penasehat Keamanan Nasional berlangsung dengan lancar serta menjamin karier McMaster ke depannya.

Sementara itu, berhubungan dengan posisi Bolton dalam perumusan kebijakan mengenai JCPOA, layaknya Trump dan Pompeo, Bolton sendiri kontra terhadap JCPOA. Posisi Bolton yang demikian dapat terlihat secara jelas pada saat dirinya belum ditunjuk oleh Trump untuk menjabat sebagai Penasehat Keamanan Nasional. Dalam sebuah sesi wawancara dengan Fox Business, Bolton menyebut JCPOA sebagai sebuah “bencana strategis”. Dikutip dari Fox Business (2016), Bolton mengatakan bahwa JCPOA tidak hanya buruk bagi AS dalam gambaran besarnya, tetapi juga ketentuan-ketentuan dalam JCPOA itu sendiri buruk adanya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa satu-satunya cara bagi AS untuk kembali ke jalan yang benar adalah dengan mengakhiri JCPOA. Pernyataan Bolton mengenai JCPOA yang demikian menunjukkan posisinya yang sama dengan Trump, yaitu untuk mengakhiri JCPOA. Lantas tak heran bila Trump memilihnya untuk menjabat sebagai Penasehat Keamanan Nasional yang baru menggantikan McMaster. Trump ingin agar elite di sekitarnya memiliki pandangan yang serupa dengannya. Lebih lanjut, dalam sebuah pidato yang disampaikan di Paris pada tahun 2017, Bolton menyarankan agar AS “mengganti” rezim pemerintahan di Iran. Dikutip dari Free Iran (2017), Bolton secara tegas menyatakan bahwa kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah AS adalah untuk menggulingkan rezim pemerintah di Iran. Hal itu perlu dilakukan oleh pemerintah AS dalam pandangan Bolton karena perilaku dari rezim tidak akan berubah sehingga solusinya adalah mengganti rezim itu sendiri. Adapun yang dimaksudkan oleh perilaku rezim yang dimaksudkan oleh Bolton adalah berbuat “curang” terhadap ketentuan-ketentuan dalam JCPOA.

Terakhir, terkait dengan Menhan Mattis yang juga mendukung JCPOA, beruntung bagi dirinya karena ia tidak bernasib sama seperti Tillerson maupun McMaster. Hal itu dikarenakan Trump memutuskan untuk tidak memecat Mattis dari jabatannya setelah Mattis merubah “nadanya” terhadap JCPOA. Dikutip dari Ward (2018), Mattis yang pada tanggal 8 Mei 2018 memberikan penjelasan terkait keputusan Trump untuk mengeluarkan AS dari JCPOA mengatakan bahwa AS telah meninggalkan JCPOA karena kesepakatan tersebut tidak memadai untuk upaya jangka panjang. Pernyataan Mattis yang demikian sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh dirinya sendiri pada saat Oktober 2017 yang menyatakan bahwa adalah kepentingan terbaik bagi AS untuk tetap berada dalam JCPOA. Perubahan sikap Mattis terhadap JCPOA yang demikian sesungguhnya merupakan hasil dari cara Trump mempengaruhi dua elite lain yang terlibat dalam perumusan

McMaster dipecat oleh Trump dan digantikan oleh Pompeo dan Bolton, Mattis sadar bahwa hanya tinggal dirinya sendirilah yang mendukung JCPOA yang tersisa. Mengenai hal ini, dikutip dari Hudson dan Rucker (2018), Mattis lantas menahan diri untuk tidak secara agresif mengulangi posisinya sebagai oposisi terhadap Trump. Lebih baik bagi Mattis sendiri untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Trump setelah ia melihat bagaimana koleganya yang menentang Trump kehilangan jabatannya. Hal yang demikian lantas dapat menjelaskan bagaimana Trump pada akhirnya berhasil mengeluarkan AS dari JCPOA. Mengutip Beauchamp (2018), Trump pada akhirnya membuat dirinya dikelilingi oleh individu-individu yang hanya dapat berkata “ya” selagi Trump sendiri membuat salah satu kebijakan paling berpengaruh dalam masa kepresidenannya.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan penulis sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah Trump sebagai seorang perumus kebijakan luar negeri tidak bereaksi terhadap realitas objektif, melainkan ia bereaksi terhadap realitas subjektif yang mana *belief* yang dimilikinya telah berperan sebagai filter. Hal ini terwujud ketika banyak *belief* Trump yang tidak sesuai dengan fakta. Trump memiliki *belief* bahwa JCPOA merupakan sebuah kesepakatan buruk yang merugikan AS dan pada akhirnya, ia mengambil kebijakan untuk mengeluarkan AS dari JCPOA. Kesimpulan yang kedua yang dapat penulis sampaikan adalah Trump sebagai seorang perumus kebijakan rela mengambil tindakan ekstreme demi tercapainya tujuan Trump sendiri dan terwujudnya kebijakan luar negeri sebagai akibat *belief* yang dimiliki. Ia rela “melepaskan” elite yang mendukung JCPOA demi *belief*-nya.

Referensi

Buku Elektronik

- Trump, D. (1987). *The Art of the Deal*. 1st ed. [ebook] New York: The Random House Publishing Group. Tersedia di: <http://www.propmgmtforms.com/forms/ebooks/trump-the-art-of-the-deal.pdf> [Diakses 22 November 2018].
- Trump, D. (2015). *Crippled America: How to Make America Great Again*. [ebook] New York City: Simon & Schuster. Tersedia di: <http://raca.care/election/trump/Crippled%20America.pdf> [Diakses 4 Maret 2019].
- Trump, D. dan McIver, M. (2009). *Think Like a Champion*. [ebook] New York City: Vanguard Press. Tersedia di: <https://www.pdfdrive.com/think-like-a-champion-e30177466.html> [Diakses 4 Maret 2019].

Jurnal Ilmiah

- George, A. (1969). The "Operational Code": A Neglected Approach to the Study of Political Leaders and Decision-Making. *International Studies Quarterly*, [daring] 13(2), pp.190-223. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/3013944> [Diakses 19 Oktober 2018].
- Hermann, M. (1980). Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, [daring] 24(1), pp.7-46. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/2600126> [Diakses

- Hermann, M. dan Hagan, J. (1998). International Decision Making: Leadership Matters. *Foreign Policy*, [daring] (110), p.124. Tersedia di: https://www.jstor.org/stable/1149281?read-now=1&seq=1#metadata_info_tab_contents [Diakses 19 Oktober 2018].
- Lovett, F. (2006). Rational Choice Theory and Explanation. *Rationality and Society*, [daring] 18(2), pp.237-272. Tersedia di https://www.researchgate.net/publication/228350783_Rational_Choice_Theory_and_Explanation [diakses 19 Oktober 2018].
- Mercer, J. (2010). Emotional Beliefs. *International Organization*, [daring] 64(01), pp.1-31. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/40607979> [Diakses 19 Oktober 2018].
- Renshon, J. (2008). Stability and Change in Belief Systems. *Journal of Conflict Resolution*, [daring] 52(6), pp.820-849. Tersedia di: <https://www.jstor.org/stable/27638642> [Diakses 19 Oktober 2018].
- Wolf, R. (2017). Donald Trump's Status-Driven Foreign Policy. *Survival*, [daring] 59(5), pp.99-116. Tersedia di: https://www.researchgate.net/publication/314870929_Make_America_Great_Again_Donald_Trump's_Mission_to_Restore_Respect_for_America [Diakses 4 Maret 2019].

Laporan

- Kerr, P. dan Katzman, K. (2018). *Iran Nuclear Agreement and U.S. Exit*. [daring] Washington D.C.: Congressional Research Service. Tersedia di: <https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44017.pdf> [Diakses 27 Agustus 2018].

Berita Daring

- BBC (2018). *HR McMaster: Why did Trump dump national security adviser?*. [daring] Tersedia di: <https://www.bbc.com/news/world-europe-39033934> [Diakses 8 April 2019].
- Beauchamp, Z. (2018). *Trump's withdrawal from the Iran nuclear deal, explained*. Vox [daring]. Tersedia di <https://www.vox.com/world/2018/5/8/17328520/iran-nuclear-deal-trump-withdraw> [Diakses 27 Agustus 2018].
- Hepher, T. (2017). *Exclusive: Iran in talks with UK over jetliner export funding*. Reuters [daring]. Tersedia di <https://www.reuters.com/article/us-iran-britain-financing-exclusive-idUSKBN1800VW> [Diakses 29 November 2018].
- Hudson, J. dan Rucker, P. (2018). *Why Trump torpedoed Obama's Iran deal*. The Washington Post. [daring] Tersedia di: https://www.washingtonpost.com/politics/i-told-everybody-this-is-what-i-was-going-to-do-why-trump-torpedoed-obamas-iran-deal/2018/05/08/a1d39a68-52f0-11e8-9c91-7dab596e8252_story.html?utm_term=.ba399be89132 [Diakses 8 April 2019].
- Parker, A., Dawsey, J., Rucker, P. dan Leonig, C. (2018). *Trump decides to remove national security adviser, and others may follow*. The Washington Post. [daring] Tersedia di: https://www.washingtonpost.com/politics/trump-decides-to-remove-national-security-adviser-and-others-may-follow/2018/03/15/fea2ebae-285c-11e8-bc72-077aa4dab9ef_story.html?noredirect=on&utm_term=.934f06f3e9b8 [Diakses 8 April 2019].

- Time Staff (2015). *Here's Donald Trump's Presidential Announcement Speech*. Time [daring]. Tersedia di <http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/> [Diakses 16 November 2018].
- Ward, A. (2018). *Mike Pompeo, your likely new – and Trump-friendly – secretary of state*. Vox. [daring] Tersedia di: <https://www.vox.com/world/2017/11/30/16719690/mike-pompeo-hearing-confirmation-congress> [Diakses 8 April 2019].
- Ward, A. (2018). *Remember when Jim Mattis was supposed to rein in Donald Trump?*. Vox. [daring] Tersedia di: <https://www.vox.com/world/2018/5/9/17335908/trump-iran-deal-announcement-mattis> [Diakses 8 April 2018].
- Ward, A. (2018). *Trump's national security adviser, H.R. McMaster, is out. It was a long time coming*. Vox. [daring] Tersedia di: <https://www.vox.com/2018/3/22/16065042/hr-mcmaster-trump-john-bolton-fired> [Diakses 8 April 2019].

Artikel Daring

- Greenberg, J. (2018). *Donald Trump says Iran got \$150 billion and \$1.8 billion in cash. That's Half True*. [daring] politifact.com. Tersedia di <https://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2018/apr/27/donald-trump/donald-trump-iran-150-billion-and-18-billion-c/> [Diakses 29 November 2018].
- Hains, T. (2018). *Mike Pompeo Endorses "Fixing" Iran Deal In Senate Confirmation Hearing*. RealClearPolitics. [daring] Tersedia di: https://www.realclearpolitics.com/video/2018/04/12/mike_pompeo_endorses_iran_deal_in_senate_confirmaton_hearing.html [Diakses 8 April 2019].
- Iaydjiev, I. (2011). *Decision Makers, Personal Belief, and Foreign Policy*. [daring] E-International Relations. Tersedia di: <https://www.e-ir.info/2011/05/04/decision-makers-personal-belief-and-foreign-policy/> [Diakses 19 Oktober 2018].
- Missile Threat. (2018). *Missiles of Iran*. [daring] Tersedia di: <https://missilethreat.csis.org/country/iran/> [Diakses 29 November 2018].
- Qiu, L. (2016). *No, Donald Trump, we are not giving Iran \$150 billion for 'nothing'*. [daring] politifact.com. Tersedia di <https://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/mar/17/donald-trump/no-donald-trump-we-are-not-giving-iran-150-billion/> [Diakses 29 November 2018].
- Smith, C. (2017). *Trump's Cold War with the C.I.A. Could Derail the Iran Deal*. [daring] Vanity Fair. Tersedia di: <https://www.vanityfair.com/news/2017/10/trumps-cold-war-with-the-cia-could-derail-the-iran-deal> [Diakses 8 April 2019].
- Trump, D. (2018). *Remarks by President Trump on the Joint Comprehensive Plan of Action*. [daring] The White House. Tersedia di <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/> [Diakses 28 November 2018].
- Trump, D. (2018). *Statement from the President on the Reimposition of United States Sanctions with Respect to Iran*. [daring] The White House. Tersedia di <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-reimposition-united-states-sanctions-respect-iran/> [Diakses 27 Agustus 2018].

U.S. Department of State (2015). *Joint Comprehensive Plan of Action*. Vienna.

Video

CNN (2018). *Trump tells media why he fired Rex Tillerson*. [video] Tersedia di: https://www.youtube.com/watch?v=-_M2R64pgJQ [Diakses 8 April 2019].

Fox Business (2016). *John Bolton: Iran deal was a strategic debacle*. [video] Tersedia di: <https://www.youtube.com/watch?v=lENc4nfnIPs> [Diakses 8 April 2019].

Free Iran (2017). *Excerpts from Amb. John Bolton's speech at the Free Iran Gathering Paris 1 July 2017*. [video] Tersedia di: <https://www.youtube.com/watch?v=hTMh24qlyQA> [Diakses 8 April 2019].

Harris, J., Posner, J. dan Fisher, M. (2015). *How the Iran nuclear deal works, explained in 3 minutes*. [video] Tersedia di: <https://www.youtube.com/watch?v=oqvghou5m3U> [Diakses 27 Agustus 2018].

Twitter

Trump, D. (2018) 13 Maret. Tersedia di <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/973540316656623616> [Diakses 8 April 2019].

Trump, D. (2018) 22 Maret. Tersedia di <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/976948306927607810> [Diakses 8 April 2019].